

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan daerah. Di antara berbagai jenis destinasi wisata yang berkembang di Indonesia, wisata pantai menjadi salah satu yang paling potensial karena negara ini memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Keindahan alam pesisir, keanekaragaman hayati laut, serta kekayaan budaya masyarakat pesisir menjadikan pariwisata pantai sebagai primadona dalam menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Banyak destinasi wisata pantai di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi lingkungan, tata kelola, hingga pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, isu strategis dalam pengelolaan pariwisata pantai menjadi penting untuk dianalisis guna menjamin keberlanjutan sektor ini di masa mendatang.¹

Salah satu isu strategis yang mencuat adalah lemahnya tata kelola destinasi wisata. Pengelolaan pariwisata pantai kerap kali tidak terintegrasi antar sektor, baik di tingkat pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Padahal, pengelolaan pariwisata

¹ Putu Dwi Lestari, I Nyoman Gede Mahaputra, dan I Made Agus Wibawa, "Analisis Dampak Sampah Plastik Terhadap Lingkungan Pantai Akibat Aktivitas Pariwisata," *Jurnal Ilmiah Ilmu Lingkungan* 18, no. 2 (2020)

membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk menjamin keberlanjutan ekosistem dan ekonomi. Kurangnya koordinasi ini berdampak pada tumpang tindih kebijakan, konflik kepentingan, serta lambannya respons terhadap permasalahan yang muncul, seperti degradasi lingkungan, kemacetan, dan over kapasitas. Selain itu, persoalan lingkungan menjadi isu strategis yang tidak bisa diabaikan. Aktivitas pariwisata yang tidak dikelola secara berkelanjutan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan pesisir, seperti abrasi, pencemaran laut, dan kerusakan terumbu karang.

Isu strategis lainnya terletak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Meskipun pariwisata membawa potensi ekonomi, kenyataannya masih banyak masyarakat lokal yang belum mendapatkan manfaat optimal dari sektor ini. Beberapa studi menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi manfaat ekonomi antara pelaku usaha besar dan masyarakat lokal menjadi pemicu konflik sosial. Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal justru tersingkir dari ruang kelola karena dominasi investor besar, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas pariwisata. Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan pariwisata pantai masih tergolong rendah. Padahal, keberhasilan suatu destinasi wisata sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku utama.²

Hal ini sejalan dengan pendekatan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat,

² Nur Diana Sari dan Agung Nugroho, "Tantangan Pengelolaan Pariwisata Pantai Berkelanjutan di Indonesia: Studi Kasus Pantai Selatan Jawa," *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 5, no. 1 (2021)

dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya bersama secara adil dan berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan, kurangnya regulasi spesifik yang mengatur pengelolaan kawasan wisata pantai juga menjadi tantangan. Banyak destinasi belum memiliki rencana induk pengelolaan pariwisata yang komprehensif. Akibatnya, pembangunan wisata seringkali tidak memperhatikan daya dukung lingkungan maupun karakteristik sosial budaya lokal.

Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata pantai harus diarahkan pada upaya peningkatan kualitas tata kelola melalui pendekatan kolaboratif, pelibatan aktif masyarakat lokal, dan perlindungan terhadap lingkungan pesisir. Strategi pembangunan yang hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sosial akan berdampak negatif dalam jangka panjang. Dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang ada, maka diperlukan formulasi kebijakan dan strategi pengelolaan yang mampu menjawab tantangan tersebut secara holistik. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek sosial, lingkungan, ekonomi, dan kelembagaan menjadi kunci utama dalam mendorong pengelolaan pariwisata pantai yang berkelanjutan dan inklusif.³

Di Indonesia, praktik tata kelola pemerintahan pada umumnya masih didominasi oleh pendekatan tradisional yang bersifat *top-down*, di mana proses perumusan dan implementasi kebijakan lebih banyak ditentukan oleh otoritas

³ Dewi Wahyuni, "Pola Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai," *Jurnal Administrasi Publik* 13, no. 1 (2022)

pemerintah pusat atau daerah tanpa melibatkan aktor-aktor non-negara secara aktif. Pendekatan ini diwarisi dari pola birokrasi kolonial dan otoritarianisme masa lalu, yang menekankan pada kendali pusat, instruksi satu arah, dan minimnya partisipasi public. Dalam konteks pembangunan daerah, termasuk sektor strategis seperti pengelolaan pariwisata, pendekatan *top-down* menunjukkan berbagai kelemahan mendasar. Meskipun pemerintah memiliki otoritas dan sumber daya, keterbatasan dalam hal keterlibatan aktor lokal, rendahnya koordinasi lintas sektor, serta lemahnya akuntabilitas menjadi penghambat utama dalam pencapaian tata kelola yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Di tengah kompleksitas isu sosial-ekonomi saat ini, pendekatan satu arah dinilai tidak lagi relevan, terlebih dalam menghadapi kebutuhan pengelolaan sumber daya yang inklusif dan berbasis kolaborasi.

Salah satu problem utama dari tata kelola *top-down* adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya dijadikan sebagai objek pembangunan, bukan subjek yang memiliki hak dan kapasitas untuk terlibat dalam perencanaan, implementasi, maupun evaluasi kebijakan. Selain itu, pendekatan *top-down* juga menyebabkan terjadinya sentralisasi pengambilan keputusan yang kurang responsif terhadap dinamika lokal. Dalam tata kelola yang terlalu terpusat, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan menjadi terbatas. Akibatnya, banyak kebijakan bersifat seragam dan tidak adaptif terhadap keragaman konteks lokal, baik dari aspek geografis, sosial budaya, maupun kapasitas institusional daerah. Problematika lain yang muncul dari pendekatan tata kelola *top-down* adalah lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah maupun antara

pemerintah dengan aktor non-pemerintah. Dalam sektor pariwisata misalnya, pengelolaan destinasi sering kali melibatkan banyak instansi seperti dinas pariwisata, dinas lingkungan hidup, serta pemerintah nagari atau kelurahan. Namun, tanpa koordinasi yang memadai, program yang dilaksanakan menjadi tumpang tindih, tidak efisien, dan bahkan kontraproduktif.

Tidak hanya itu, tata kelola *top-down* juga sering kali rentan terhadap praktik birokratisasi dan keterlambatan dalam merespons kebutuhan masyarakat. Dalam sistem yang hierarkis, arus informasi cenderung satu arah dari atas ke bawah, sehingga masukan atau keluhan dari masyarakat sulit dijangkau oleh pembuat kebijakan. Proses administratif yang panjang dan kaku juga menghambat fleksibilitas dan inovasi dalam merespons persoalan di lapangan. Hal ini berdampak pada menurunnya efektivitas pelayanan publik serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Lebih lanjut, tata kelola *top-down* juga tidak mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan lintas sektor dan lintas aktor yang semakin meningkat dalam era modern. Permasalahan tata ruang, keberlanjutan lingkungan, dan kesenjangan ekonomi tidak bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan satu arah dari pemerintah. Dibutuhkan pendekatan tata kelola yang kolaboratif (*collaborative governance*), di mana pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas lokal bekerja sama secara sinergis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Pendekatan ini dianggap lebih adaptif, demokratis, dan mampu menciptakan solusi yang inklusif. Maka dari itu, penting untuk merefleksikan

kembali kelemahan tata kelola tradisional yang masih dominan di berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan pariwisata daerah.

Transformasi menuju tata kelola yang lebih partisipatif dan kolaboratif bukan hanya menjadi tuntutan zaman, melainkan sebuah kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan memperkuat legitimasi kebijakan publik. Kegagalan untuk beradaptasi dengan model tata kelola yang lebih terbuka dan dialogis hanya akan memperdalam kesenjangan antara negara dan masyarakat, serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami berbagai problematika yang melekat pada tata kelola *top-down*, maka akan semakin jelas urgensi untuk mengembangkan pendekatan tata kelola alternatif yang lebih demokratis dan inklusif. Kolaborasi multi-aktor, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik harus menjadi pilar utama dalam tata kelola sektor publik di era desentralisasi dan demokratisasi saat ini. Hal ini sangat penting terutama dalam sektor pariwisata yang melibatkan banyak kepentingan dan berdampak langsung pada ekonomi lokal serta kelestarian lingkungan.⁴

Dalam dinamika tata kelola pemerintahan modern, pendekatan *Collaborative Governance* muncul sebagai respons terhadap keterbatasan model tata kelola tradisional yang bersifat hierarkis dan sentralistik. Model ini mendorong keterlibatan berbagai aktor baik dari sektor negara maupun non-negara untuk bekerja sama secara deliberatif dan partisipatif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan

⁴ T. Effendi, "Reformasi Tata Kelola Pemerintahan: Dari Top-Down Menuju Partisipatif," Jurnal Administrasi Publik 15, no. 2 (2020)

publik. Keterlibatan multipihak ini menjadi penting seiring meningkatnya kompleksitas persoalan publik yang tidak bisa lagi diselesaikan secara sepihak oleh pemerintah. Oleh karena itu, *collaborative governance* menjadi kerangka yang relevan dalam menjawab tantangan tata kelola yang inklusif, adaptif, dan berbasis partisipasi. Aktor-aktor dalam *collaborative governance* terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, akademisi, dan media. Masing-masing memiliki peran strategis dalam menyumbangkan perspektif, sumber daya, serta kapasitas yang dibutuhkan dalam proses kolaboratif. Pemerintah tetap berfungsi sebagai pemegang otoritas formal dan pembuat regulasi, namun dalam pendekatan kolaboratif, pemerintah dituntut untuk menjadi fasilitator dan penghubung antaraktor yang berbeda kepentingan. Fungsi pemerintah tidak lagi mendominasi, melainkan menciptakan arena deliberasi yang memungkinkan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan.⁵

Sektor swasta turut memainkan peran penting dalam kolaborasi, terutama dalam hal penyediaan inovasi, efisiensi, dan sumber daya ekonomi. Melalui kemitraan publik swasta, sektor ini dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan, terutama di bidang infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil memegang fungsi penting dalam mendorong inklusivitas, representasi kelompok marjinal, serta sebagai pengawas terhadap proses kebijakan agar tetap akuntabel dan berpihak pada kepentingan public.

⁵ R. Maulani dan E. Yuliana, "Dinamika Kolaborasi Aktor dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 1 (2020)

Akademisi memberikan kontribusi melalui kajian ilmiah dan data empiris yang dapat menjadi dasar formulasi kebijakan, sementara media berperan dalam menyampaikan informasi serta mengawasi dinamika kolaboratif secara transparan. Namun, dalam praktiknya, dinamika hubungan antaraktor dalam *collaborative governance* tidak selalu berjalan harmonis. Terdapat berbagai tantangan struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas kolaborasi. Salah satu isu utama adalah ketimpangan kekuasaan dan sumber daya antaraktor, di mana aktor negara atau korporasi besar cenderung lebih dominan dibandingkan kelompok masyarakat sipil atau komunitas lokal. Ketimpangan ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam proses pengambilan keputusan dan menghambat terwujudnya kesetaraan dalam kolaborasi.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk dan desentralistik, penerapan *collaborative governance* menghadapi tantangan tersendiri. Perbedaan budaya, tingkat pendidikan, dan struktur sosial masyarakat lokal menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam membangun kolaborasi yang efektif. Tidak hanya itu, masih rendahnya literasi kebijakan di tingkat akar rumput juga menjadi penghambat partisipasi yang bermakna. Oleh karena itu, proses edukasi publik, pelatihan kepemimpinan lokal, serta penciptaan ruang deliberatif menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran aktor dalam tata kelola kolaboratif. Secara keseluruhan, *collaborative governance* tidak hanya menuntut kerja sama antaraktor, tetapi juga pengelolaan yang cermat terhadap dinamika dan relasi kuasa di antara mereka. Penguatan kepercayaan, kesetaraan partisipasi, dan komitmen kolektif menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan kolaborasi. Dalam era di mana legitimasi kebijakan

publik ditentukan oleh tingkat partisipasi dan transparansi, maka pendekatan kolaboratif menjadi pilihan strategis dalam menciptakan tata kelola yang berkeadilan, responsif, dan berkelanjutan.⁶

Pariwisata pesisir, khususnya pariwisata pantai, merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Indonesia. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia dianugerahi kekayaan alam bahari yang luar biasa dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, potensi besar ini tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas tata kelola dan keberlanjutan lingkungan yang diharapkan. Pengelolaan pariwisata pantai di berbagai daerah masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, terutama dalam hal tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan. Banyak kawasan wisata pantai yang belum dikelola secara optimal karena pendekatan yang digunakan masih bersifat sektoral, eksploitatif, dan kurang memperhatikan partisipasi masyarakat lokal.

Dalam konteks lokal, banyak pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan destinasi pantai. Permasalahan utama yang muncul adalah lemahnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih kewenangan, kurangnya partisipasi masyarakat lokal, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Selain itu, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya pesisir tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan telah menyebabkan degradasi kawasan

⁶ D. Setiawan, "Membangun Kepercayaan dalam Tata Kelola Kolaboratif: Perspektif Partisipasi Aktor Lokal," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 15, no. 2 (2022)

wisata, pencemaran, dan konflik kepentingan antara aktor lokal dan investor. Hal ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dari pengelolaan berbasis negara ke arah pengelolaan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan.⁷

Model tata kelola tradisional yang cenderung bersifat *top-down* terbukti tidak mampu secara efektif menjawab kompleksitas permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan *collaborative governance* mulai dilirik sebagai solusi alternatif yang menjanjikan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan media dalam merumuskan kebijakan serta mengelola kawasan wisata pantai secara bersama. Kolaborasi menjadi sarana untuk memperkuat sinergi, membangun kepercayaan, serta menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika lokal. Proses kolaboratif ini juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi aktor non-negara untuk menyuarakan aspirasi mereka secara setara. Peluang kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata pantai terbuka luas, khususnya ketika ada komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberdayakan masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, konteks lokal pengelolaan pariwisata pantai di Indonesia menggambarkan pentingnya membangun tata kelola yang kolaboratif dan adaptif terhadap kondisi sosial dan ekologis setempat. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat, memperkuat jejaring antaraktor, serta mengembangkan kapasitas

⁷ R. Damayanti, "Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kolaborasi di Pantai Pandansari, Bantul," *Jurnal Pariwisata dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2022)

kelembagaan, maka peluang pengelolaan pariwisata pantai yang berkelanjutan dan inklusif akan semakin terbuka lebar. *collaborative governance* bukan hanya menjadi pendekatan teknis, tetapi juga respons politik terhadap kebutuhan akan tata kelola yang demokratis, transparan, dan berbasis keadilan sosial di wilayah pesisir.⁸

Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa penelitian yang membahas tentang kolaborasi dalam mengelola pariwisata pantai. Nuraini pada tahun 2022 meneliti Pantai Losari di Makassar dan menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat, tetapi belum menjelaskan secara mendalam bagaimana kerja sama itu terbentuk dan berjalan. Prasetyo pada tahun 2023 juga meneliti kerja sama antara pemerintah dan swasta di Pulau Tidung, tetapi belum melihat lebih jauh tentang hubungan kepercayaan, komunikasi, atau komitmen antar pihak. Sutrisno dan Lestari 2021 meneliti di Pantai Parangtritis, tetapi hanya fokus pada kerja sama formal tanpa membahas proses kolaborasi secara mendalam. Selain itu, penelitian lain seperti oleh Hasanah dkk. Maulana membahas kolaborasi di daerah lain, tapi lebih fokus pada hasil akhir, bukan proses atau tantangan dalam kerja sama.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa penelitian yang membahas tentang kerja sama (kolaborasi) dalam mengelola pariwisata pantai. Contohnya, Nuraini meneliti Pantai Losari di Makassar dan menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat, tetapi belum menjelaskan secara mendalam bagaimana kerja sama itu terbentuk dan berjalan. Prasetyo juga meneliti kerja sama antara pemerintah dan

⁸ A. Suryani, "Tantangan Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan di Wilayah Pesisir," *Jurnal Kajian Kebijakan* 14, no. 2 (2020)

swasta di Pulau Tidung, tetapi belum melihat lebih jauh tentang hubungan kepercayaan, komunikasi, atau komitmen antar pihak. Sutrisno dan Lestari meneliti di Pantai Parangtritis, tetapi hanya fokus pada kerja sama formal tanpa membahas proses kolaborasi secara mendalam. Selain itu, penelitian lain seperti oleh Hasanah dkk. Maulana membahas kolaborasi di daerah lain, tapi lebih fokus pada hasil akhir, bukan proses atau tantangan dalam kerja sama.

Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, menggunakan teori *collaborative governance* dari Emerson, Nabatchi & Balogh. Teori ini membahas empat hal penting dalam kerja sama, yaitu *drivers*, *collaborative dynamics*, *collaborative actions*. Sementara itu sebagian besar penelitian hanya menggunakan pendekatan umum tanpa menjelaskan dinamika proses kolaborasi. Penelitian ini juga fokus pada pantai padang, yang selama ini belum banyak diteliti dalam konteks tata kelola kolaboratif. Padahal, pantai padang adalah salah satu ikon wisata di Sumatera Barat yang menghadapi berbagai masalah seperti sampah, konflik kepentingan, dan kurangnya koordinasi antar pihak.

1.2 Rumusan Masalah

Pantai Padang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Padang, Sumatera Barat. Dikenal dengan sebutan “Taplau” oleh masyarakat setempat, kawasan ini tidak hanya menjadi ruang rekreasi tetapi juga ikon identitas kota yang potensial untuk mendatangkan pendapatan asli daerah. Seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, pemerintah daerah telah berupaya melakukan revitalisasi dan penataan kawasan pantai. Namun demikian,

perkembangan tersebut masih menyisakan berbagai permasalahan baik dari sisi tata kelola, lingkungan, maupun sosial-ekonomi.

Permasalahan mendasar dalam pengelolaan Pantai Padang terletak pada model tata kelola yang masih bersifat top-down dan sektoral. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata memiliki peran dominan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan, sementara pelibatan masyarakat dan komunitas lokal masih bersifat simbolik. Ketidakhadiran mekanisme tata kelola kolaboratif menyebabkan lemahnya sinergi antara instansi teknis dalam menangani masalah kebersihan, keamanan, dan penataan ruang. Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga memperburuk kualitas pengelolaan kawasan wisata ini. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan tidak sebanding dengan upaya pengelolaan lingkungan yang memadai. Salah satu masalah utama adalah buruknya pengelolaan sampah dan limbah yang berdampak langsung terhadap kualitas kawasan pantai. Selain itu, pembangunan infrastruktur wisata yang tidak memperhatikan aspek daya dukung ekologis juga menimbulkan degradasi lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir serta menyebabkan abrasi.⁹

Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tata kelola kawasan Pantai Padang secara komprehensif juga menjadi hambatan utama. Selama ini, pengelolaan dilakukan berdasarkan aturan umum tentang kawasan publik dan kepariwisataan, tanpa pedoman teknis yang spesifik. Ketidakjelasan wewenang antara pemerintah

⁹ Hari Setia Putra, Dedi Andriansyah, dan Melani Fitri, "Integrasi Kawasan Wisata Pantai Padang dalam Pengembangan Pariwisata Kota Padang," *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Vol. 5, No. 1 (2020)

kota, kecamatan, dan kelurahan dalam mengelola kawasan pantai turut memperburuk koordinasi. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan lambannya penanganan berbagai persoalan di lapangan. Meski Pantai Padang telah mengalami revitalisasi fisik, namun ketersediaan fasilitas pendukung wisata masih tergolong minim. Kurangnya toilet umum yang bersih, tempat ibadah, papan informasi, serta jalur pedestrian yang aman menjadi keluhan utama wisatawan. Infrastruktur parkir yang terbatas juga menyebabkan kemacetan dan parkir sembarangan. Kondisi ini bukan hanya merugikan pengunjung, tetapi juga merusak estetika kawasan yang sedang dibangun citranya sebagai destinasi wisata unggulan.¹⁰

Dengan mempertimbangkan fenomena di atas, peneliti berasumsi bahwa pengelolaan pariwisata Pantai Padang tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif dari berbagai aktor, termasuk masyarakat lokal, pelaku usaha, komunitas, serta lembaga non-pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah Kota Padang dipandang memiliki posisi sebagai fasilitator utama yang bertanggung jawab dalam menciptakan ruang kolaboratif melalui komunikasi yang terbuka, transparansi informasi, serta keterlibatan aktor-aktor strategis dalam proses pengambilan keputusan. Kolaborasi tersebut diyakini terjadi atas dasar adanya kepentingan bersama antar pihak, seperti peningkatan pendapatan daerah, pelestarian lingkungan pantai, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penciptaan lapangan kerja lokal. Penelitian ini juga mengasumsikan bahwa proses

¹⁰ Dwi Purnomo dan Rahmadani Yusran, "Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Padang: Studi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota," *Jurnal Tata Kota*, Vol. 7, No. 2 (2021)

kolaborasi tidak semata-mata dibangun atas dasar kebijakan formal atau struktur pemerintahan, melainkan sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan, komitmen bersama, serta adanya pemahaman timbal balik yang terbangun dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keberhasilan *collaborative governance* dalam pengelolaan Pantai Padang sangat ditentukan oleh kapasitas bersama dari seluruh aktor yang terlibat, baik dari segi sumber daya manusia, dukungan anggaran, legalitas kelembagaan, maupun kesediaan untuk bekerja lintas sektor. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa model kolaboratif berbasis teori Emerson, Nabatchi dan Balogh dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan bersama dapat dibangun secara bertahap melalui *drivers*, *collaborative dynamics*, *collaborative actions*.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata Pantai Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ilmu politik, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana proses kolaboratif antar aktor berlangsung dalam praktik pengelolaan sektor publik, khususnya pariwisata.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Padang dan para pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki dan mengembangkan pola kerja sama yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan wisata Pantai Padang. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan berbagai pihak yang terlibat.

